

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Presiden ke-8 RI Joko Widodo dan kabinet kerjanya dikenal masif membangun banyak infrastruktur untuk pemerataan kesejahteraan sosial pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selama memegang jabatan kepresidenan Jokowi telah berhasil membangun 3.432 km jalan Nasional, 941 jalan tol, serta jaringan irigasi baru seluas 860.015 hektar dan 65 bendungan baru (Fauzi, 2019).

Membangun bendungan menjadi salah satu prioritas Pemerintahan Jokowi. Bendungan bermanfaat terutama bagi masyarakat menengah ke bawah untuk pengairan sawah dan memberikan mata pencaharian kepada masyarakat sekitar. Selain itu, bendungan bermanfaat untuk budidaya ikan dan sumber daya hayati lainnya. Bendungan juga sangat bermanfaat untuk menyediakan air bersih, pengendalian banjir, dan pembangunan PLTA.

Melihat banyaknya manfaat dari pembangunan bendungan, Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya dengan gencar membangun banyak bendungan di seluruh Indonesia. Pemerintah era Joko Widodo telah berhasil menyelesaikan 65 bendungan di periode 2015-2019 (Detik, 2017).

Beberapa bendungan telah selesai pembangunannya pada tahun 2014-2019. Salah satunya adalah Bendungan Teritip yang berlokasi di Kalimantan Timur. Bendungan tersebut memiliki luas genangan sampai 94,80 hektar dengan kapasitas 2,43 juta m³. Bendungan ini menambah pasokan air baku Kota Balikpapan sebanyak 250 liter/detik dari saat ini yang hanya sebesar 1.000 liter/detik yang dipasok dari Bendungan Manggar. Kebutuhan air baku Kota Balikpapan sendiri mencapai 1.600 liter/detik (PUPR, 2017).

Selain merencanakan dan membangun bendungan yang diharapkan akan memberikan banyak manfaat, Pemerintahan era Jokowi juga melanjutkan pembangunan bendungan yang sebelumnya telah lama dilakukan seperti Bendungan Payaseunara, Aceh yang mulai pembangunan pada tahun 2001 sampai dengan 2015. Bendungan Payaseunara yang berkapasitas 1,3 juta m³ dan luas genangan yang mencapai 98 ha itu memerlukan biaya sebanyak Rp. 94,89 miliar. Bendungan ini diharapkan memberikan manfaat bagi penyediaan air baku sebesar 125 liter/detik dan menjadi salah satu sumber air utama di Aceh. Bendungan selanjutnya yang diresmikan era Jokowi adalah Bendungan Nipah sebagai Bendungan pertama di Pulau Madura, Jawa Timur. Pembangunan Bendungan ini sudah lama digagas seperti bendungan Bendungan Jatigede. Bendungan ini mulai digagas tahun 1973 dan dilanjutkan tahun 2004. Bendungan ini telah selesai Maret 2016. Bendungan Nipah dapat berfungsi dalam umur layanan 50 tahun dan mengairi sawah seluas 1.150 Ha.

Presiden Jokowi juga melanjutkan rencana pembangunan bendungan presiden sebelumnya pada tahun 2006 hingga 2015 yaitu Bendungan Bajulmati. Bendungan ini berkapasitas tampung 10 juta m³ dan mempunyai besaran genangan hingga 91,93 ha dengan total anggaran Rp 420 miliar. Bendungan ini dapat memberikan air baku sebanyak 0,11 meter kubik setiap detik juga dapat digunakan untuk menjadi sarana pengairan 1.800 hektar pesawahan. Kedua, Bendungan Ranjui yang terletak di Desa Masjid Tanjong, Padang Tiji, Provinsi NAD.

Bendungan ini mulai pembangunan tahun 2011 dan selesai tahun 2015. Bendungan ini telah menelan biaya sebesar Rp. 110,65 miliar. Bendungan Ranjui berkapasitas 33,6 ha. Bendungan ini diharapkan mampu menampung air sebanyak 2,67 juta meter kubik untuk mengairi areal persawahan seluas 4.790 ha. Kemudian yang berlokasi di Kabupaten Buleleng Bali yaitu Bendungan Titab, yang selesai pada tahun 2015 sejak awal pembangunan yaitu 2011. Bendungan yang dibangun dengan biaya Rp 486 miliar, memiliki kapasitas luas genangan 68,83 ha dan daya tampung 13 juta m³ tersebut akan mengairi Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.

Terakhir adalah bendungan yang berada di Kabupaten Sumedang Jawa Barat, Bendungan Jatigede. Sejak tahun 2007, bendungan ini telah dibangun dan diresmikan presiden tahun 2015. Bendungan ini telah mengairi sawah yang ada di Indramayu, Majalengka, dan Cirebon seluas 90.000 hektar lahan dengan kapasitas tampungan airnya yang mencapai 980,57

juta m³. Bendungan Jatigede merupakan jenis bendungan urugan batu yang memiliki luas sekitar 1.766,06 ha. Bendungan ini mampu menyuplai air untuk PLTA yang mampu menghasilkan listrik sebesar 690 GWH pertahun dengan kapasitas 110 MW memiliki tinggi 110 m - 200 m dan 3.500 liter/detik (Purnama, 2015).

Pembangunan Bendungan Jatigede sudah sangat lama direncanakan, tepatnya mulai dirintis sejak zaman Presiden Soekarno. Namun, kenyataannya, Bendungan Jatigede baru rampung tahun 2013 dan diresmikan Senin, 31 Agustus 2017. Menurut Adeng (2014), Bendungan Jatigede merupakan bendungan terluas di Indonesia kedua setelah Jatiluhur, Bendungan Jatigede termasuk proyek lama yang mulai dari tahun 1960-an, dalam pembebasan lahan dimulai sejak tahun 1970-an. Kemudian pembangunan Jatigede dirintis kembali tahun 2008 dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan penyelesaian pembangunannya pada tahun 2014.

Dalam membangun Bendungan Jatigede, Pemerintah memerlukan lahan seluas 4.891,13 ha yang secara otomatis dengan paksa menenggelamkan dua puluh enam desa serta lima kecamatan. Kecamatan yang ditenggelamkan termasuk Jatigede 751,45 ha, Kecamatan Jatinunggal 229,25 ha, Kecamatan Wado 461,22 ha, Kecamatan Darmaraja 1.606,36 ha, Kecamatan Cisitu 73,45 ha, tanah kehutanan 1.200 ha, tanah terlewat 107 ha, serta puluhan situs sejarah (Nurlela, 2012).

Dari wilayah genangan tersebut, terdapat penduduk yang terkena genangan sebanyak 191.198 jiwa dan luas wilayahnya 450,25 km². Jumlah penduduk yang terdusur secara ekonomi berjumlah 3.911 KK, sedangkan jumlah penduduk yang terdusur secara fisik berjumlah 17.896 KK, sehingga total keseluruhan adalah 21.807 KK (Nurlela, 2012).

“Tidak ada *nawaitu* Pemerintah untuk menyengsarakan rakyatnya, pasti tiap upaya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya” itu merupakan potongan sambutan Menteri PUPR ketika membuka peresmian Bendungan Jatigede. Namun kenyataannya, Bendungan Jatigede yang telah digenangi memberikan keadaan yang cukup berbeda dari sebelum Bendungan Jatigede dibangun, seperti keadaan ekologi lingkungan sekitar, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi masyarakat sekitar Bendungan Jatigede. Karena pembangunan Bendungan Jatigede telah merubah keadaan ekologi lingkungan sekitar Bendungan Jatigede, hal itu merubah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Desa Wado (Yuzar 2015).

Peneliti menduga adanya perubahan sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh pembangunan Bendungan Jatigede, salah satu penyebab adalah adanya masyarakat yang tempat tinggalnya direndam dan harus melakukan relokasi ke tempat lain. Selain itu, banyak masyarakat Desa Wado yang lahan pertaniannya terampas akibat pembangunan tersebut dan otomatis telah merebut lahan pekerjaan masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, masyarakat Wado berusaha mencari strategi adaptasi ekologi agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan keluarganya. Melihat permasalahan yang muncul akibat dampak dari pembanguann Bendungan Jatigede, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian berkenaan dengan adapatasi masyarakat Desa Wado akibat dampak pembangunan Bendungan Jatigede.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat diidentifikasi oleh peneliti sebagai berikut:

1. Terdapat alih fungsi lahan yang menyebabkan perubahan ekologi di Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang.
2. Adanya perubahan kondisi sosial akibat perubahan ekologi masyarakat Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang.
3. Adanya perubahan kondisi ekonomi akibat perubahan ekologi masyarakat Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang.

C. Rumusan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi ekologi sesudah pembangunan Bendungan Jatigede?

2. Bagaimana kondisi sosial masyarakat akibat perubahan ekologi sesudah pembangunan Bendungan Jatigede?
3. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat akibat perubahan ekologi sesudah pembangunan Bendungan Jatigede?
4. Bagaimana adaptasi ekologi masyarakat yang terkena dampak perubahan sosial-ekonomi akibat pembangunan Bendungan Jatigede?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi ekologi masyarakat sesudah penggenangan Bendungan Jatigede.
2. Untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat akibat perubahan ekologi sesudah penggenangan Bendungan Jatigede.
3. Untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonomi masyarakat akibat perubahan ekologi sesudah penggenangan Bendungan Jatigede.
4. Untuk mengetahui adaptasi ekologi masyarakat yang terkena dampak perubahan sosial-ekonomi akibat pembangunan Bendungan Jatigede.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memperkaya khazanah Sosiologi, khususnya Sosiologi Lingkungan. Diharapkan penelitian ini dijadikan bahan acuan bagi para peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini mampu menjadi informasi bagi masyarakat maupun para pembuat kebijakan bahwa setiap pembangunan akan selalu ada dampak dan perubahan sosial, ekonomi dan perubahan lainnya.

Selain itu, semoga penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan terhadap penanganan masalah ekologi, sosial, dan ekonomi setelah ada penggenangan bendungan. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber acuan/referensi adaptasi ekologi masyarakat yang terkena dampak Bendungan Jatigede.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan teori 'adaptasi budaya' sebagai kerangka teoritiknya. Teori ini dikemukakan oleh seorang antropolog Amerika, Julian H. Steward, yang ia jadikan menjadi bagian dari disiplin ilmu antropologi sekitar tahun 1950-an. Teori adaptasi budaya ini mempunyai *approach* yang begitu berbeda dari konsep dan teori ekologi manusia lainnya. Ini adalah suatu teori ekologi manusia yang berlandaskan pada konsep sosiologis.

Yang terjadi saat ini, di sekitar kita terjadi banyak masalah yang harus segera terselesaikan. Masalah-masalah tersebut di antaranya adalah kemiskinan yang dapat menjadi parah dan berakibat pada kelaparan. Masalah *crucial* lainnya adalah berkaitan dengan lingkungan alami yang mencakup perusakan lingkungan, eksploitasi alam, ideologi totaliter dan hilangnya kebebasan (Lapka & Vavra, 2012).

Ekologi budaya mempunyai kesadaran yang besar apabila masalah-masalah yang terjadi bersifat struktural dan berkesinambungan, harapan kita selama ini mempromosikan berbagai diskusi yang bersifat saintist dan berada dipertengahan antara sains serta masyarakat. Masalah-masalah penting seperti masalah ekonomi, sosial dan lingkungan tidak akan teratasi dan tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya dialog yang seimbang dari pembangunan berkelanjutan mengenai tiga permasalahan tersebut.

Hal ini dapat diartikan bahwa akan ada akhir dominasi neoliberal ekonomi yang abai terhadap nilai-nilai. Klimaks dan inti dari permasalahan tersebut bahwa sektor utama dalam pembangunan berkelanjutan yaitu lingkungan, ekonomi, dan masyarakat yang tidak bisa berjalan sendiri-sendiri atau mempunyai egonya masing-masing, diharapkan tiga permasalahan tersebut mempunyai posisinya benar-benar nampak di dunia (Lapka & Vavra, 2012).

Ekologi budaya merupakan suatu pendekatan yang terpadu. Teori ini mempunyai harapan kuat dalam memberikan dukungan berbagai dialog

cabang- cabang ilmiah juga dalam sains dan publik. Mengenai adanya jebakan dalam sebuah pemecahan masalah, teori ini lebih menekankan pembicaraan mengenai toleransi berbagai usaha yang nyata yang dapat memberikan dorongan dialog-dialog pemangku kebijakan dan tentu dengan ilmuwan. Ekologi budaya mempunyai pendekatan yang secara langsung dan diberikan dorongan kognitif, fokus utama pendekatan teori ini adalah mengenai isu lingkungan dan sosial yang terjadi pada hari ini. Teori ini paham mengenai hubungan manusia dengan alamnya merupakan suatu dialog setara yang dapat diutarakan dengan intens didalam sebuah lanskap budaya (Lapka & Vavra, 2012)

Ilmu lingkungan dapat memberikan bantuan dan dukungan terhadap tahapan-tahapan ini. Namun, tetap bahwa garis besar terdiri dari bagian-bagian seperti nilai dan perilaku pada individu tersebut. Perubahan yang terjadi bukan terletak dalam ilmunya. Tetapi, inti dari perubahan ini tidak terletak pada ilmu itu sendiri. Ini terdiri dari nilai-nilai dan perilaku masing-masing individu (Lapka & Vavra, 2012).

Tabel 1 Skema Pemikiran





